

PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA USAHA INDUSTRI BORDIR DI PROVINSI ACEH

Yuli Kusdiarni¹

¹Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Aceh
Korespondensi: kusdiarni@yahoo.com

ABSTRAK

Pada saat ini sinergi peran antara pemangku kepentingan untuk menciptakan akses dan memobilisasi kepada pengusaha sangat berpengaruh pada kinerja usahanya. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat peran pemangku kepentingan yang mampu membawa pengaruh yang lebih baik pada keberhasilan industri bordir. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemangku kepentingan, –pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan–, terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir di Aceh. Sebanyak 200 pengusaha dijadikan sampel dan hipotesis diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah dan pengusaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir. Namun akademisi, perkumpulan dan lembaga keuangan tidak memberikan pengaruh terhadap yang signifikan terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir.

Kata kunci: pemangku kepentingan, kinerja usaha, industri bordir, Aceh

ABSTRACT

A role synergy between stakeholders in creation of access and mobilization of entrepreneurs greatly influences their business's performance. The author is, in this research, interested to observe stakeholders' role which leads to higher success in embroidery industry. This research aims at testing the influence of stakeholders, – government, academics, entrepreneurs, association and financial institution–, on the improvement of embroidery industry's business performance in Aceh. This research takes 200 entrepreneurs as its samples and tests the hypotheses by employing the multiple linear regression analysis. The analysis results conclude that government and entrepreneurs significantly influence the improvement of embroidery industry's business performance. However, academics, association and financial institution do not significantly influence the improvement of embroidery industry's business performance.

Key words: stakeholders, business performance, embroidery industry, Aceh

PENDAHULUAN

Pengembangan sektor industri kecil mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, dikarenakan sektor ini memberikan banyak dampak pada penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya, dan pembangunan ekonomi di pedesaan. Selain itu industri kecil berperan penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara optimal. Industri kecil juga mempunyai peran yang berkualitas dalam perekonomian nasional, sehingga mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu sektor industri yang mendukung Pendapatan Daerah Aceh adalah industri bordir. Perkembangan industri bordir ini dari tahun ke tahun telah menghasilkan beraneka

ragam produk dompet, tas, koper, gamis, baju koko, kerudung, mukena, sajadah dan asesoris lainnya. Dari semua jenis produk tersebut, dompet dan tas merupakan produk unggulan dan terkenal ke manca negara.

Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2014), Provinsi Aceh memiliki pengusaha bordir sejumlah 401 orang dengan dibantu oleh 1593 orang karyawan. Investasi yang dimiliki oleh pengusaha ini senilai Rp. 7.829,9 juta, dengan kapasitas produksi sebesar 3.463,68 juta unit, dan nilai produksi tersebut senilai Rp. 26.139,658 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mempunyai nilai produksi sebesar Rp. 23.755,508 juta.

Pengembangan industri bordir tidak terlepas dari peranan para pengusaha dalam menciptakan, mempertahankan dan juga memperluas pemasarannya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pengusaha, sering kali mereka kesulitan memperoleh akses terhadap inovasi, padahal mereka harus selalu memperhatikan perubahan yang sedang berlangsung dan berusaha lebih baik untuk dapat mengembangkan inovasi produknya sehingga meningkatkan kinerja usahanya.

KERANGKA TEORI

Wiklund (1999) menyatakan bahwa kinerja sebagai hasil kerja yang telah dicapai oleh para pelaku usaha kecil menengah untuk mengembangkan organisasi mereka. Sementara Armstrong (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi dalam ekonomi. Kinerja usaha dalam penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari melakukan kegiatan membuat produk kerajinan bordir motif khas Aceh. Kinerja usaha dilihat dari: volume penjualan, pangsa pasar, jaringan usaha dan pelanggan.

Dalam usaha untuk meningkatkan kinerja usaha industri bordir perlu dukungan pemangku kepentingan yang melibatkan para aktor seperti seperti yang diungkapkan oleh Afonso et.al (2012) Carayannis dan Champbell (2015) tentang *Quadruple Helix*, yaitu: berfokus pada hubungan antara universitas, bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Karsidi dan Irianto dalam Karsidi (2007) mengusulkan peran pemangku kepentingan yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi kemajuan usaha kecil dan menengah, yaitu: UKM itu sendiri, Kelompok/Koperasi, Asosiasi Usaha, Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank), Pasar, Pemerintah dan Perguruan Tinggi.

Pemangku kepentingan dalam penelitian ini merupakan aktor yang berbagai bentuk keterlibatannya mendukung peningkatan kinerja industri bordir. Pemangku kepentingan industri bordir akan ditinjau dari: 1) Pemerintah, 2) Akademisi, 3) Pengusaha, 4) Perkumpulan/Asosiasi usaha dan 5) Lembaga Keuangan.

Pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan kinerja usaha industri bordir berperan dalam: 1) Pemerintah selaku pemangku kepentingan yang memberikan sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan teknis dan pelatihan manajemen, bantuan peralatan mesin, dan promosi untuk mengikuti pameran di dalam negeri maupun di luar negeri; 2) Akademisi disamping memiliki tugas Tri Dharma, juga mempunyai layanan untuk meningkatkan usaha kecil melalui inkubator bisnis; 3) Pengusaha Bordir sebagai produsen produk yang terus melakukan inovasi; 4) Perkumpulan para pengusaha juga memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan eksistensi mereka di dunia usaha; dan 5) Lembaga Keuangan akan menguatkan kemampuan keuangan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Pengembangan industri bordir tidak hanya diprakarsai oleh pengusaha bordir itu sendiri tetapi juga butuh dukungan dari berbagai pihak yang memangku kepentingan. Untuk itu

diperlukan kemampuan pengusaha dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan industri bordir. Pemangku kepentingan dapat dianggap sebagai pihak yang dapat membantu pengembangan industri bordir yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pengusaha itu sendiri, perkumpulan dan lembaga keuangan.

Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan mampu mencapai tujuan dari meningkatkan kinerja usaha industri bordir. Maka, sinergitas dari kelima pemangku kepentingan ini merupakan prinsip generatif dalam pengembangan industri bordir yang terintegrasi. Voss et.al (2005) menyatakan bahwa masing-masing pemangku kepentingan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pengusaha harus memiliki wawasan yang mampu memilah untuk menghasilkan dukungan pemangku kepentingan yang berbeda.

Dari permasalahan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah: apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan usaha industri bordir dari Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Perkumpulan dan Lembaga keuangan secara bersama-sama. Dari kelima variabel tersebut di atas, variabel manakah yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Perkumpulan dan Lembaga keuangan secara bersama-sama terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir. Kemudian mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir dan berapa besar pengaruh dari variabel tersebut terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir.

METODE

Penelitian ini dilakukan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu: Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan format eksplanasi. Menurut Bungin (2013) penelitian menggunakan format eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya.

Sampel yang diambil adalah 200 orang yang merupakan para pengusaha industri bordir di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Pembagian jumlah sampel di tiap Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan penelitian dilakukan dengan cara *proporsional sampling*. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi sampel penelitian, dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas terkait dan laporan hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner berupa data ordinal dan telah ditransformasikan menjadi data interval. Menurut Riduan dan Sunarto (2012), proses transformasi berguna untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya berskala interval.

Analisis data menggunakan analisis linier berganda adalah di mana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 , ..., X_n) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan (Riduan dan Sunarto, 2012). Pada penelitian ini variabel terikat adalah kinerja usaha industri bordir (Y) dan variabel bebas adalah Pemerintah (X_1), Akademisi (X_2), Pengusaha (X_3), Perkumpulan (X_4) dan Lembaga Keuangan (X_5).

DISKUSI

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh variabel pemangku kepentingan, –pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan–, terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir di Aceh secara gabungan/simultan dan secara sendiri/parsial, maka persamaan untuk model diagram analisis regresi linear berganda pada dimaksud dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = C + \rho Y.X_1 + \rho Y.X_2 + \rho Y.X_3 + \rho Y.X_4 + \rho Y.X_5 \dots\dots (1)$$

- a. Melihat pengaruh secara gabungan/simultan pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir.

Untuk menganalisis pengaruh secara gabungan/simultan pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir, dapat dilihat dari Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Pengaruh Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Perkumpulan dan Lembaga Keuangan terhadap Kinerja Usaha Industri Bordir

Uraian	Koefisien Diterminasi R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate	F	Sig.	α
Persamaan 1	0,432	0,417	6,316920	29,473	0,000	0,05
Keputusan			H1 diterima			

Sumber : Data primer, diolah (2018)

Ghozali (2005) menyatakan bahwa untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi (R²). Nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati satu menunjukkan semakin baik kemampuan variabel bebas menerangkan variabel terikat, namun bila nilai koefisien determinasi semakin mendekati 0 maka pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini menggunakan Adjusted R² karena menurut Santoso (2005), untuk regresi dengan jumlah variabel independen lebih dari dua digunakan Adjusted R² sebagai koefisien determinasi.

Tabel 1 ditunjukkan bahwa besarnya angka Adjusted R-square adalah 0,417. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir secara gabungan/simultan, sebesar 0,417. Sisanya sebesar 0,583 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar kelima variabel tersebut.

Pengujian kelayakan model regresi dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan membandingkan besarnya harga F hasil penelitian dengan F tabel. Cara kedua, adalah dengan membandingkan angka taraf signifikansi (sig) dengan hasil penghitungan dengan taraf signifikansi 0,05.

Dengan menggunakan cara pertama yaitu membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Angka F penelitian dari output SPSS didapat sebesar 29,473. Sementara derajat kebebasan (DK) adalah jumlah variabel – 1 = 6 – 1 = 5; dan denominator = jumlah sampel – 4 = 196. Dengan ketentuan tersebut diperoleh angka F tabel sebesar 2,26. Sementara itu berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya ada pengaruh antara pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir. Dengan demikian, model regresi yang diestimasi adalah layak.

- b. Melihat pengaruh secara sendiri/parsial variabel pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir.

Pengaruh secara sendiri/parsial variabel pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan terhadap kinerja usaha industri bordir, dapat dilihat dari nilai *unstandardized coefficients* (B) pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Koefisien Kreativitas Personal, Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal dan Pemangku Kepentingan Terhadap Orientasi Kewirausahaan

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Nilai t	Sig.	α
Konstanta (C)	17,638	5,758	0,000	0,05
Pemerintah (X ₁)	0,802	4,176	0,000	0,05
Akademisi (X ₂)	0,330	1,624	0,106	0,05
Pengusaha (X ₃)	0,710	3,541	0,000	0,05
Perkumpulan (X ₄)	0,192	1,499	0,135	0,05
Lembaga Keuangan (X ₅)	0,046	0,345	0,730	0,05

Sumber : Data primer, diolah (2018)

Tabel 2 di atas menggambarkan persamaan regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji hipotesis signifikansi koefisien regresi. Angka konstanta dari *unstandardized coefficients* hasil penelitian ini adalah 17,638. Angka ini berupa angka konstan yang mempunyai arti: besarnya tingkat kinerja usaha saat nilai pemerintah, akademisi, pengusaha, perkumpulan dan lembaga keuangan sama dengan 0.

Uji secara sendiri/parsial ditunjukkan oleh Tabel 2 memperlihatkan nilai koefisien regresi pemerintah terhadap kinerja usaha, nilai koefisien regresi akademisi terhadap kinerja usaha, nilai koefisien regresi pengusaha terhadap kinerja usaha, nilai koefisien regresi perkumpulan terhadap kinerja usaha dan nilai koefisien regresi lembaga keuangan terhadap kinerja usaha. Hipotesis penelitian yang dirumuskan dengan hipotesis statistik berikut:

H₀ = Pemerintah/akademisi/pengusaha/perkumpulan/lembaga keuangan tidak berpengaruh terhadap orientasi kewirausahaan

H₁ = Pemerintah/akademisi/pengusaha/perkumpulan/lembaga keuangan berpengaruh terhadap orientasi kewirausahaan

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi maka dibandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \leq \text{sig}$), maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau ($0,05 \geq \text{sig}$), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya signifikan.

Hubungan antara pemerintah dengan kinerja usaha: didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 4,177 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa ada pengaruh antara pemerintah dan kinerja usaha. Besarnya pengaruh pemerintah terhadap kinerja usaha sebesar 0,802.

Hubungan antara akademisi dengan kinerja usaha: didasarkan perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 1,624 dan nilai signifikansi sebesar 0,106, yang berarti tidak ada pengaruh antara akademisi dan kinerja usaha. Besarnya pengaruh akademisi terhadap kinerja usaha sebesar 0,330 dianggap tidak signifikan.

Hubungan antara pengusaha dengan kinerja usaha: didasarkan perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 3,541 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti ada pengaruh antara pengusaha dan kinerja usaha. Besarnya pengaruh pengusaha dan kinerja usaha sebesar 0,710.

Hubungan antara perkumpulan dengan kinerja usaha: didasarkan perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 1,499 dan nilai signifikansi sebesar 0,135, yang berarti tidak ada pengaruh antara perkumpulan dan kinerja usaha. Besarnya pengaruh perkumpulan terhadap kinerja usaha sebesar 0,192 dianggap tidak signifikan.

Hubungan antara lembaga keuangan dengan kinerja usaha: didasarkan perhitungan diperoleh angka t penelitian sebesar 0,345 nilai signifikansi sebesar 0,730, yang berarti tidak ada pengaruh antara lembaga keuangan dan kinerja usaha. Besarnya pengaruh lembaga keuangan terhadap kinerja usaha sebesar 0,046 dianggap tidak signifikan.

Dengan demikian persamaan untuk hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 17,638 + 0,802.X_1 + 0,710.X_3 \dots\dots (2)$$

Di antara faktor-faktor pemangku kepentingan yang diteliti, pemerintah – akademisi – pengusaha – perkumpulan – lembaga keuangan, hanya pemerintah dan pengusaha yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha industri bordir di Aceh. Sementara akademisi, perkumpulan dan lembaga keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha industri bordir di Aceh karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berpengaruh terhadap kinerja usaha. Ini dapat dilihat dari banyaknya dukungan Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, melalui Dinas/Badan terkait baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah telah berupaya melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui Tenaga Penyuluh Lapangan, pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajemen, mendorong terciptanya jaringan kerjasama antara industri bordir dengan pihak lain, memberikan bantuan peralatan/mesin dan modal usaha, mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran produk baik di dalam maupun di luar daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Kraja et.al (2014) dan Sidauruk (2013) yang menyatakan bahwa ada hubungan peran pemerintah untuk mendorong kemajuan industri kecil dan menengah.

Pengusaha juga berpengaruh terhadap kinerja usaha industri bordir. Pengusaha merupakan pemegang peranan terpenting terhadap peningkatan kinerja usahanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha telah mampu melakukan pengembangan usaha dengan target yang telah ditetapkan semula, menciptakan jaringan usaha baik sesama pengusaha maupun dengan pemasok dan pelanggan, menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan, dan adanya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungannya. Ini sesuai dengan pendapat Karsidi (2007) bahwa pelaku memegang peran yang sangat penting (pemegang kunci) dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri dan Sihotang (2010) yang menyatakan bahwa ada pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap kinerja.

Dalam penelitian ini, akademisi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja usaha. Akademisi sebenarnya telah banyak membantu pengembangan industri bordir, seperti melakukan survei potensi industri, penerbitan buku industri kecil dan menengah di 90 kampung di Banda Aceh, pembuatan website bagi industri kecil dan menengah, pemberian insentif bagi industri kecil dan menengah yang terpilih, integrasi data industri ke Badan Ekonomi Kreatif, pengajuan HKI ke Kementerian Hukum dan HAM, dan juga pemberian beberapa alat produksi. Namun demikian, peran dari akademisi tidak begitu sentral sehingga pelaku industri bordir belum merasakan secara langsung peran akademisi tersebut dan mereka menganggap bahwa akademisi tidak berperan dalam pengembangan kinerja usahanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Izzati dan Wilopo (2018) bahwa akademisi masih belum cukup mendorong pertumbuhan industri yang ditandai dengan sedikitnya peran yang dijalankannya.

Penelitian Azizah (2014) menyatakan bahwa perkumpulan atau asosiasi sebagai wadah atau organisasi yang membantu para pengusaha dalam meminta bantuan kepada pemerintah, memberi jalan bagi pengusaha agar dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dengan mendapatkan informasi-informasi dari pemerintah melalui organisasi tersebut. Sementara dukungan perkumpulan pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh terhadap kinerja usaha industri bordir. Ini dikarenakan hanya ada sebuah perkumpulan industri bordir bernama Grup IKM Aceh. Namun perkumpulan ini belum berbadan hukum dan belum maksimal dalam mengelola kegiatan yang berhubungan dengan industri bordir. Sementara itu, tidak semua pengusaha bordir menjadi anggota perkumpulan ini. Sehingga pengusaha tidak maksimal mendapat informasi dan penyebaran pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan industri bordir.

Sebaiknya para pengusaha secara bersama dapat membentuk sebuah perkumpulan baik formal atau berbadan hukum seperti sebuah koperasi, maupun non formal seperti membentuk grup di media sosial. Melalui sebuah koperasi mereka dapat menghimpun modal usaha secara mandiri, mendorong tumbuhnya kreativitas dan meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Melalui media sosial dapat dibentuk sebuah grup bagi pengusaha sehingga mereka dapat membangun sebuah kerjasama yang dapat memudahkan mereka saling bertukar informasi tentang pasar, promosi, perolehan bahan baku dan lainnya. Perkumpulan itu sendiri dapat bermanfaat untuk terbentuknya jalinan hubungan yang baik dengan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama serta dapat saling berinteraksi sehingga mereka dapat saling memperingati tentang kesalahan dan membagi pengalaman yang baik.

Penelitian ini tidak membuktikan adanya pengaruh lembaga keuangan terhadap peningkatan kinerja usaha. Ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2011) dan Jubaedah dan Destiana (2016). Walaupun Bank Indonesia telah melakukan pemberdayaan melalui pola klaster di dua lokasi, Aceh Utara dan Aceh Besar. Klaster bentukan ini dinilai sangat baik membantu para pengusaha mendapatkan pasar bagi produknya. Namun, pengusaha yang tidak bergabung pada kedua klaster tersebut masih menganggap bahwa Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya masih memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi dan hanya sebagian kecil pengusaha yang telah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan usaha, keuangan dan pemasaran dari lembaga keuangan. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada pengusaha agar dapat bersinergi dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana, pelatihan dan pembinaan, baik pelatihan teknis maupun pelatihan keuangan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa belum adanya sinergi antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu diperlukannya sebuah sinergi untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis sesama para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Dengan bersinergi, kerjasama dari pola pikir yang berbeda akan mewujudkan hasil yang lebih baik dan efektif.

KESIMPULAN

1. Ada pengaruh Pemerintah, Akademisi, Pengusaha, Perkumpulan dan Lembaga keuangan secara bersama-sama terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir sebesar 41,7%, sedangkan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.
2. Variabel yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan kinerja usaha industri bordir adalah Pemerintah dan Pengusaha. Pengaruh Pemerintah terhadap kinerja usaha sebesar 0,802 dan pengaruh Pengusaha terhadap kinerja usaha sebesar 0,710. Sementara Akademisi, Perkumpulan dan Lembaga Keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha industri bordir di Aceh karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

UCAPAN TERIMA KASIH

Proyek penelitian ini telah didukung oleh program pascasarjana Universitas Sebelas Maret, yang disponsori oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, O. Monteiro, S. Thomson, M. (2012). A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory. *Journal of Business Economics and Management*, Vol. 13, Issue 4, p 1-31
- Agustin, A.F. (2011). Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.9. No.2. Desember 2011.
- Armstrong, M. (2004). *Performance Manegement*. Tugu. Yogyakarta.
- Azizah, N. (2014). Model Pengembangan Industri Kecil Konveksi Melalui Apik (Asosiasi Pengrajin Industri Konveksi) di Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Economics Development Analysis Journal*. EDAJ 3 (2) (2014). p. 293-306.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Carayannis, E.G. Campbell, D.F.J. (2015). Art and Artistic Research in Quadruple and Quintuple Helix Innovation Systems, 29-51. In G. Bast, E. G. Carayannis, D. F. J. Campbell (Eds.). *Arts, Research, Innovation and Society*. New York, NY: Springer (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09909-5_3).
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. (2014). *Direktori Industri Kecil Aceh 2014*. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Banda Aceh
- Ghozali, I. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.

- Izzati, M.F. dan Wilopo. (2018). Implementasi *Triple Helix* dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif di Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.55. No.1. p. 59-68.
- Jubaedah, S. dan Destiana, R. (2016). Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah, *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Volume 2 Isue 2. Agustus 2016. p. 93-103.
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*. September 2007. Vol. 3. No.2. hal. 136-145
- Kraja, Y.B. Osmani, E. dan Molla, F. (2014). The Role of The Government Policy for Support the Sme-S, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 3, No 2, June 2014, p.391-396.
- Makridakis, S. Wheelwright, S.C. and McGee, V.E. (2003). Metode dan Aplikasi Peramalan. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Riduwan dan Sunarto. (2012). Pengantar Statistika untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Santoso, S. 2005. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Cetakan Keempat. Jakarta. Penerbit PT Elexmedia Komputindo.
- Sidauruk, R. (2013). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*. Volume 5. Nomor 3. Edisi September 2013. p. 141-158.
- Sihotang, S. (2010). Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kinerja Pengrajin Sentra Industri Tenun Ikat. *Ekuitas*. Vol.14. No.1. Maret 2010. p.57-81.
- Voss., Z.G. Voss, G.B. dan Moorman, C. (2005). An Empirical Examination of The Complex Relationships Between Entrepreneurial Orientation and Stakeholder Support. *European Journal of Marketing*. Volume 39. Issue 9/10. p. 1132-1150.
- Wiklun, J. (1999). The Sustainability of the Entrepreneurial Orientation Performance Relationship, *Entrepreneurship: Theory and Practice*, Vol.24, No.1, p 43-53